
MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TEHORU KABUPATEN MALUKU TENGAH (TINJAUAN PROGRAM P3SD)

Maryam Sangadji dan Ummi Duwila

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura
Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka-Ambon, 97233, Indonesia

ABSTRACT

Through the Village Law Number 6 of 2014, each village is expected to play a role in the framework of strengthening the village socially and economically. This study aims to examine the empowerment programs that have been carried out by the Ministry of Villages in Tehoru Village through basic social service programs. The research objectives were: (1) To determine the process of implementing the basic social service learning center program; (2) to determine the model for strengthening the basic social service learning center program. The analysis was carried out using a qualitative method approach. The results showed (1) The program implementation process was carried out in two stages, namely: program preparation and program implementation. These two stages have not been maximal in involving stakeholders, it seems that those involved are people who are close to the king, (2) The Empowerment Model of physical and non-physical programs is the experience of the community in management so that the construction expected to be a model of strengthening is from the perspective of the village community Tehoru.

Keyword: Empowerment, Basic Social Learning Center, Qualitative

JEL Classification: I38, D83, C25

PENDAHULUAN

Mendasarkan UU No 6 Tahun 2014 hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam Ketentuan Umum Pasal 1, yakni: Pembangunan Desa dan Pemberdayaan desa. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (pasal 1 angka 8) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat dibiayai oleh pemerintah bagi Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar antara lain: (1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa, (2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan

Pusat Pembelajaran Pelayanan Sosial Dasar (P3SD) merupakan salah satu nama kegiatan yang melakukan program-program sosial dasar oleh pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada 34 Provinsi di Indonesia. P3SD diharapkan, masyarakat desa akan lebih berdaya melalui ketersediaan sarana prasarana dasar serta diharapkan desa yang telah diintervensi program akan menjadi percontohan bagi desa lain dalam menggerakkan pembangunan desa terutama dalam pelayanan sosial dasar.

Untuk mengetahui keberadaan program yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah kementerian desa melalui mitra kerja yang ada di daerah yaitu Universitas Pattimura sebagai pelaksana program di Desa Tehoru, maka penelitian ini penting dilakukan sehingga tingkat keefetivan maupun ketidakefektifan dalam proses maupun keberlanjutan di tingkat masyarakat secara kemandirian dapat diketahui.

Terdapat beberapa program yang dilakukan sejak tahun 2016-2017. Jika pemberdayaan diharapkan akan memunculkan keberdayaan maka setiap program harus ada keterlibatan masyarakat sebagai subjek maupun objek pembangunan inilah yang kemudian dikatakan pembangunan sebagai sebuah proses yang didalamnya keterlibatan masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan,

monitoring sampai pada evaluasi, sehingga akan diketahui kelebihan dan kekuatannya. Penemuan kekuatan maupun kelemahan dalam pelaksanaan program selanjutnya menjadi bahan baku bagi penguatan program lebih baik lagi, sehingga tujuan penelitian ini akan mengarah pada desain terhadap penguatan program pemberdayaan pusat pelayanan sosial dasar.

LANDASAN TEORITIS

Pembangunan Pedesaan

Sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di daerah pedesaan mayoritas masih dalam dalam kondisi miskin. Di luar itu wilayah pedesaan karena lokasinya masih jauh dari pusat kota/pembangunan-dicirikan oleh terbatasnya infrastruktur ekonomi, sedikitnya kesempatan

kerja di luar pertanian (*non-farm*), dan jauh dari pasar (Yustika, 2016). Karena kemiskinan pedesaan lebih mendominasi dalam keterpurukan pembangunan berbagai para ahli seperti Boeke yang terkenal dengan “Dualisme Ekonomi” menjadi diskursus penting dalam pembangunan pedesaan.

Hasil penelitian Boeke menyimpulkan bahwa perekonomian Indonesia (Hindia Belanda), Jawa khususnya terbagi dalam dua sektor: tradisional dan moderen yang saling tidak berhubungan. Untuk mengatasi ketidakseimbangan akibat perekonomian dualistic tersebut, menurut Boeke, sektor tradisional perlu dirangsang melalui insentif ekonomi dan peningkatan teknologi produksi, meskipun hasilnya tak akan segera tampak.

Elis menarikan dualisme ekonomi menjadi isu strategis pembangunan pedesaan merupakan gagasan pembangunan pedesaan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel (1) Isu Strategis Pembangunan Pedesaan

Dekade	Isu Strategis
1950-an	Modernisasi, model dualisme ekonomi, “keterbelakangan” pertanian, pembangunan komunitas dan petani malas (<i>lazy peasants</i>)
1960-an	Pendekatan transformasi, transfer teknologi, mekanisasi, penyuluhan pertanian, peranan pertumbuhan pertanian, revolusi hijau (awal) dan petani rasional
1970-an	Redistribusi dengan pertumbuhan, kebutuhan dasar, pembangunan pertanian yang terintegrasi, kebijakan pertanian oleh negara, kredit yang di stimulus oleh negara, bias perkotaan, introduksi inovasi, revolusi hijau (lanjutan) dan pertumbuhan pedesaan yang terkait (<i>rural growth linkages</i>)
1980-an	Penyesuaian struktural, pasar bebas, kebijakan harga yang tepat (<i>getting price right</i>), meminimalisasi peran negara (<i>retreat of the state</i>), meningkatkan peran NGOs, <i>rapid rural appraisal</i> (PRA), penelitian sistem pertanian (<i>farming system research</i>), analisis ketahanan pangan dan kelaparan, pembangunan pedesaan sebagai proses (bukan produk), perempuan dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan (<i>poverty reduction</i>)
1990-an	Kredit mikro, <i>participatory rural appraisal</i> (PRA), pembangunan perdesaan berorientasi pelaku (<i>actor</i>), analisis stakeholders, jaringan pengaman perdesaan, jender dan pembangunan, lingkungan dan kesinambungan (<i>sustainability</i>) dan pengurangan kemiskinan (<i>poverty reduction</i>)
2000-an	Penghidupan yang berlanjut (<i>sustainable livelihoods</i>), tata kelola yang baik (<i>good governance</i>), desentralisasi, kritik terhadap partisipasi, pendekatan sectoral yang diperluas (<i>sector-wide approach</i>) perlindungan social dan pemusnahan kemiskinan (<i>poverty eradication</i>)

Sumber: Ellis dan Bigg, 2001.

Program P3SD, adalah mengharuskan terjadi *sustainable livelihood*, tata kelola yang baik, desentralisasi, perlu partisipasi aktif masyarakat sejak perencanaan program sampai pada monitoring dan mengevaluasi di tingkat kelembagaan desa (*sanini negeri*), hasil akan diketahui jika kelembagaan desa berfungsi sebagaimana hasil penelitian Sangadji, Muspida (2019), bahwa perubahan keberdayaan dari program di desa terlihat apabila terjadi evaluasi rapat *sanini negeri*.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Priyono dan Pranarka (1996), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengungkap fenomena pengelolaan program pada P3SD. Pendekatan kualitatif digunakan agar dapat mengkaji interaksi antar para aktor yang terlibat dalam program tersebut.

Analisis Data dilakukan melalui tahapan: (1) membuat manuskrip dari setiap hasil wawancara, (2) mengkodekan setiap jawaban yang telah diberikan oleh responden (3) mereduksi data terhadap hasil yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, (4)

menghubungkan/mengaitkan antar berbagai hasil yang telah di peroleh dilakukan secara berulang untuk mendapatkan hasil yang objektif dari perspektif para aktor/responden

HASIL DAN PEMBAHASAN

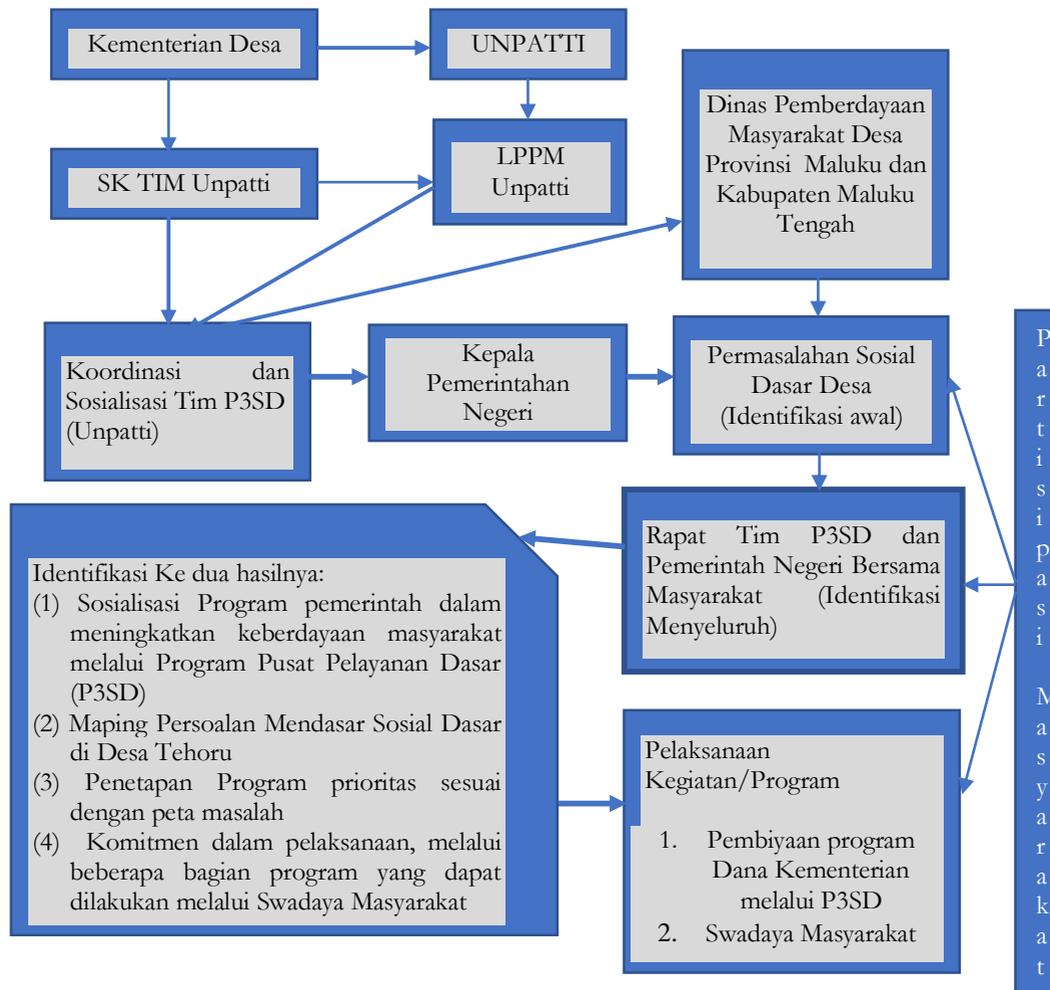
Proses Pelaksanaan Program Pusat Pembelajaran Pelayanan Sosial Dasar

Program harus dipastikan dijalankan melalui mekanisme yang sesuai dengan tujuan dari pemberi Program. Program P3SD, dari hasil kajian dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tahapan yaitu: Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan program dengan dua bentuk program yaitu program fisik maupun non-fisik.

Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Program

A. Persiapan

Kegiatan untuk pelaksanaan Program Fisik di lihat secara proses dimulai dari persiapan sampai pada pelaksanaan program yang terdiri dari program fisik yaitu (1). Bantuan paket buku KTSP 2006 pada Sekolah SD Inpres Tehoru, (2). Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah SD Negeri 1 Tehoru, (3). Pembangunan 2 buah Paud di Negeri Tehoru, (4). Bantuan 8 buah Sumur Bor, (5). Bantuan Modal Bergulir bagi kelompok usaha ikan asin.



Gambar (1). Partisipasi Masyarakat pada Persiapan Program

Tahapan persiapan program P3SD, dimulai dari Kementerian Desa bekerjasama dengan Universitas Negeri terpilih di Indonesia dan Unpatti di Maluku, melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat membentuk tim pelaksana. Gambar satu menjelaskan bahwa, program yang direncanakan tidak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah desa namun di tetapkan secara bersama melalui mekanisme aturan adat (Mayam Sangadji, Muspida, 2019) aturan adat dalam kelembagaan desa yaitu Rapat *Saniri Negeri*, dengan bahasa yang lain bahwa kelembagaan *saniri negeri* adalah merupakan wadah untuk berpartisipasi komunitas atau masyarakat. Oleh Priyono dan Pranaka 1996 partisipasi itu menggambarkan sebuah proses. *Saniri Negeri* merupakan rapat yang dilakukan oleh pemerintah negeri yang di hadiri oleh seluruh masyarakat Pemerintahan negeri ini didalam strukturnya meliputi seluruh kepala-kepala Soa. Kepala Soa merupakan perwakilan marga yang terhimpun dalam satu persekutuan marga, yang diangkat untuk masuk

dalam pemerintahan negeri/desa, sebagaimana tererekam pada kutipan di bawah ini:

“Semua kegiatan di Desa terlebih dahulu Kami rencanakan atau kita tetapkan bersama melalui rapat di tingkat perangkat desa (rapat kecil) kemudian, hasilnya kami bawakan di rapat semua masyarakat desa, di dalam rapat saniri negeri (rapat besar). Untuk di berikan masukan, di tambahkan ataupun dikurangi atau juga memberikan masukan-masukan yang menurut masyarakat sangat urgen di lakukan.” (Hasil Wawancara: Pejabat Desa)

“Kalau tidak dirapatkan program-program di saniri negeri itu pasti ada terjadi masalah antara staf negeri dengan keor keor. Apalagi keadaan negeri kita masih pejabat raja.” (wawancara: Tokoh masyarakat desa)

Dari hasil wawancara tergambar dengan jelas bahwa semua keputusan apapun harus di musyawarahkan secara

bersama melalui kelembagaan negeri/desa. Jika pranata sosial ini tidak berjalan itu tanda bahwa ada terjadi konflik antar masyarakat dengan pemerintahan negeri atau antar staf pemerintahan negeri atau antar staf pemerintahan negeri dengan raja. Dengan kata lain interaksi sosial dalam kelembagaan adat memegang peran penting, mengisyaratkan bahwa “aturan adat” sebagai symbol adanya kebersamaan dalam menjalankannya. Jika kebersamaan luntur maka seluruh keputusan untuk kegiatan pembangunan bagi masyarakat mengalami kendala untuk diputuskan secara bersama.

B. Pelaksanaan Program dan Dampaknya

Pelaksanaan program dilakukan oleh masyarakat Tehoru, sejak perencanaan sampai pada pelaksanaan, sedangkan pendampingan dan monitoring dilakukan oleh Tim Unpatti. Pelaksanaan program dilakukan sejak tahun 2016 sampai 2017. Setiap program yang telah dilakukan pada tahun pertama di evaluasi dan dilakukan perencanaan untuk program tahun berikutnya. Dengan mekanisme sebagaimana gambar 1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program yang dapat menggambarkan partisipasi sesuai dengan kesepakatan yang telah di putuskan secara bersama pada rapat di tingkat masyarakat (*sumini negeri*) tergambar di bawah ini.

1. Pembangunan dua buah paud dan sarana di Negeri Tehoru

Negeri Tehoru sangat luas karena memiliki *dasum* oleh masyarakat di sebut anak desa, itu sebabnya kebutuhan infrastruktur gedung Paud sangat dibutuhkan sehingga dari segi kelayakan dan kebutuhan sarana pendukung layak untuk menjadi tujuan pendidikan anak di usia dini.

Di tahun 2016 melalui program Laboratorium Desa atau P3SD membangun satu Unit Paud di Negeri Tehoru, yang diberi nama “Paud Nunumahu” sehingga Total sekolah Paud di Negeri Tehoru sudah menjadi 3 unit. Paud Nunumahu telah mendapat izin pendirian dari pemerintah Negeri Tehoru dengan nomor surat izin: 420.2/01/1/2017 dan telah terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan NPSN yaitu: 69962071. Kebutuhan Paud ini terlihat dari jumlah siswa yang melonjak dari 20 siswa sejak awal pendirian di tahun 2016 menjadi 95 siswa di tahun 2018, dan guru bertambah dari 3 guru mejadi 5 guru.

Semua pendirian pembangunan paud dilakukan oleh masyarakat Tehoru yang didanai oleh Kementerian, sedangkan swadaya masyarakat khususnya orang tua siswa yaitu pada pembuatan pagar sekolah Paud. Guru Paud

berasal dari (1) sumberdaya yang ada di negeri sehingga memudahkan untuk melakukan proses pengajaran. (2) honor guru paud diambil dari dana desa yang saat ini honornya hanya sebesar Rp 150.000 per bulan dan dibayarkan setiap tiga bulan sekali, sehingga sulit mendatangkan guru dari anak desa atau dari desa Tehoru ke anak desa dengan transportasi yang mahal.

“Untuk honor guru Paud Nunumahu di Biayai Oleh Desa Melalui Dana Desa sebesar Rp.150.000 per Orang hal ini yang menjadi Kendala bagi guru guru karena merasa gaji pokok sangat kecil apalagi dengan tuntutan ekonomi yang semakin besar hal ini juga berpengaruh pada proses mengajar pada Paud Nunumahu yang gurunya jarang masuk sekolah dengan pertimbangan gaji yang sangat kecil masalah ini kami sudah usulkan pada pemerintah Negeri agar gaji guru paud bisa di tambah namun sampai saat ini belum terealisasi” (Wawancara: Ibu BH)

Dari ungkapan di atas menggambarkan nilai ekonomi yang diterima oleh guru sangat kecil, dan ini juga berdampak pada keefektifan guru dalam proses mengajar. Namun kondisi ini tetap seperti ini adanya, diterima sebagai sebuah tugas karena, pada kondisi jumlah penduduk yang cukup tinggi dan sulitnya masyarakat mendapatkan atau menciptakan lapangan kerja, maka dengan gaji yang sangat kecil tetap di terima karena banyaknya sumberdaya yang menganggur. Kecuali sumberdaya manusia yang ada memiliki keahlian lainnya sehingga tidak akan menerima pekerjaan sebagai guru paud.

“Ya...terpaksa menerima saja, karena tidak ada pekerjaan lagi. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga Saya juga membuat kue-kue untuk dijual. Sebagai tambahan pendapatan. Dengan menjadi guru paud kita juga memiliki hubungan yang luas dengan pemerintah daerah, dengan LSM dan juga dengan pemerintah desa. Melalui berbagai program-program penguatan dan pemberdayaan. Ini yang menjadi modalnya Kami tetap menjadi guru, selain itu, ini adalah anak-anak negeri, jadi tidak lain adalah anak kami juga. Sehingga sekolah Paud tetap eksis dan semakin bertambah anak-anak” (Wawancara Guru: M)

Selain sulitnya mendapat pekerjaan, unsur lainnya guru paud tetap bertahan karena ada manfaat lainnya yang didapatkan menjadi guru paud yaitu: (1) memiliki jaringan dengan Pemerintah daerah dan LSM, (2) mendapatkan manfaat dalam jaringan berupa penguatan kapasitas mengajar, kapasitas mengelola usaha ekonomi lainnya (3)

mendapatkan manfaat pemberdayaan ekonomi dalam mengelola usaha tambahan, (4) mendapatkan dana modal bergulir dalam mengembangkan usaha.(5) adanya penanam modal sosial yang tinggi dengan menganggap bahwa anak-anak yang bersekolah adalah bagian dari anak mereka. Kata bagian dari “anak anak mereka” adalah suatu bentuk modal sosial dalam “mengikatkan” dan “menumbuhkan” hubungan-hubungan diantara masyarakat desa, untuk saling membantu dan menguatkan masyarakat desa.

Dari hasil kajian, terlihat bahwa secara kelembagaan paud dengan pemerintah desa belum terbentuk secara kelembagaan dalam sistem atau pengaturan yang terlembaga dengan pengelola paud atau guru yang ada, dari sistem pembayaran honor, mengatur pengelolaan pembayaran sampai pada bagaimana mekanisme perekrutan guru dan pemberhentian, sehingga paud dapat dikelola secara profesional bagi peningkatan sumberdaya manusia secara dini. Kondisi yang terlihat juga karena semua mekanisme pengaturan melalui kelembagaan saniri negeri. Dan hingga saat ini kelembagaan saniri negeri juga masih terjadi hubungan yang kurang harmonis antar pelaksana tugas raja dengan beberapa kepala soa, atau dengan kata lain masih terkendala kepemimpinan raja yang definitive.

2. Pengadaan Lemari Buku di Negeri Tehoru

Keputusan bersama pada rapat *saniri negeri* yang menetapkan kebutuhan lemari buku untuk digunakan pada kantor desa yang baru. Tujuan penggunaan lemari tersebut untuk meletakkan buku-buku bacaan apa saja yang ada di desa. Jika masyarakat datang ke kantor desa, dapat menggunakan buku-buku yang ada untuk menambah wawasan masyarakat.

Dari hasil kajian, lemari buku tetap ada namun kebutuhan buku-buku masih sangat kurang, hanya ada beberapa buku tahun 2016-2017, yang diberikan oleh Tim P3SD. Padahal dalam hasil perencanaan bersama diharapkan pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dapat membenikan kebutuhan buku, majalah sesuai dengan yang dibutuhkan ilmu pengetahuan di tingkat desa. Seharusnya pemerintah desa tidak kaku dengan tujuan dan fungsi rak buku yang diberikan, bisa juga dipergunakan untuk menaruh dokumen-dokumen perkantoran lainnya.

“Lemari masih kosong karena hanya digunakan untuk menaruh buku-buku bacaan, pemerintah desa harus bisa (dapat) menggunakannya untuk menaruh dokumen lainnya, sehingga kantor tertata dengan rapi,ada banyak dokumen yang

di taruh pada meja, kalau lemari digunakan sangat bagus. Kondisi ini juga karena pemerintahan desa masih sentral hanya ada di PLT raja. Jadi semua urusannya hanya ada di PLT.”(wawancara: Bpk.L. Masyurkat Desa)

“Begitu (seperti itu) sudah semua barang-barang pemerintah negeri karena hanya sebagian kecil pemerintah desa yang tau (mengetahui). Jadi (sehingga) agak susah juga mengatur agar bisa berfungsi secara baik.” (Wawancara Salah satu Staf pemerintah Desa)

Pernyataan di atas tersirat makna bahwa, (1) pemerintah desa belum fleksibel dalam mempergunakan sarana perkantoran yang ada (2) ada terjadi penurunan kepercayaan atas kepemimpinan raja. Pada point ke dua jika terjadi hubungan yang kurang harmonis antara staf pemerintahan dengan raja atau antara staf pemerintahan akibat ketidakseimbangan fungsi maka akan berwujud menjadi *low trust*. Dan *low trust* akan melahirkan ketidakseimbangan dalam menjalankan fungsi kelembagaan baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Kondisi ini yang terjadi oleh karena itu mengingat pemerintahan negeri adalah merupakan representative kelembagaan marga dalam menjalankan urusan pemerintahan maka yang harus dilakukan oleh pejabat raja adalah (1) dalam melakukan perencanaan kegiatan pembangunan harus melibatkan seluruh unsur pemerintahan, tidak ada unsur *like and dis like*; (2) Memfungsikan seluruh staf negeri sesuai dengan fungsi masing-masing. Sedangkan yang dapat dilakukan oleh masyarakat Desa Tehoru adalah: (1) melakukan rapat bersama di tingkat soa atau marga, untuk menyalur setiap aspirasi; (2) mendorong fungsi pemimpin marga/kepala soa agar dapat berperan aktif dalam menjalankan fungsi-fungsi mereka sesuai aturan yang telah ditetapkan di negeri.

3. Merehabilitasi Ruang Perpustakaan SD Negeri 1 Tehoru.

Ruang perpustakaan pada SD Negeri 1 Tehoru, sudah tidak layak, dan tidak berfungsi, hanya di gunakan sebagai tempat penyimpanan barang. Dari hasil kajian perpustakaan telah digunakan oleh siswa siswa dalam proses pembelajaran. Semua kebutuhan buku telah dilengkapi oleh pihak sekolah. Ruang perpustakaan yang bersih dan layak membuat siswa dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik, sebagaimana penuturan di bawah ini.

“Sejauk perpustakaan di rehabilitasi anak anak murid setelah jam istirahat banyak yang masuk ke

perpustakaan untuk membaca buku.” (Wawancara: Penjaga Perpustakaan Bpk D)

Saya sangat senang ketika perpustakaan sudah lebih baik dan Kami bisa belajar dan membaca buku di perpustakaan dengan senang. Buku-buku sudah tertata dengan rapi, Saya mudah untuk mencarinya dan sudah ada banyak buku sehingga siswa lain dapat menggunakannya secara bersamaan” (Wawancara Siswa kelas 5 JS).

4. Pengadaan Paket Buku KTSP 2006 pada SD Inpres Tehoru

Hampir sebagian besar sekolah kurang bahkan ada yang tidak memiliki kelengkapan buku KTSP 2006, kondisi yang memprihatinkan apalagi sekolah-sekolah yang bukan sekolah negeri, karena keterbatasan anggaran sekolah. Untuk mewujudkan kualitas sumberdaya manusia, maka kebutuhan buku paket ini juga menjadi prioritas program P3SD.

Hasil kajian di lapang menunjukan bahwa, buku paket yang telah di berikan ke pihak sekolah telah digunakan oleh para siswa dengan cara, menggunakannya pada saat jam pelajaran di maksud setelah mata pelajaran selesai buku dikembalikan masing-masing ke tempat penyimpanan sementara di ruang guru. Karena sekolah juga belum memiliki ruang perpustakaan.

5. Pembuatan Sumur Bor di Negeri Tehoru sebanyak lima buah dan pemasangan mesin pompa air pada sumur sebanyak tiga buah

Kebutuhan air bersih di negeri Tehoru masih sangat terbatas, karena selain daerahnya sangat luas, air dari PDAM yang saat ini hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk sering mendapatkan airnya tidak layak di konsumsi pada musim hujan karena berwarna dan berbau tidak sedap. Kebutuhan air bagi penduduk Tehoru sangat mendesak sehingga kesepakatan pada tahun 2016 di rencanakan program sumur bor pada delapan Rukun Tetangga (RT), delapan RT ini hanya di negeri Tehoru (negeri induk).

“Harapan kedepan jika ada bantuan yang sama maka harus di data warga yang benar benar membutuhkan bantuan tersebut seperti warga yang belum mamakai Air dari PDAM atau yang tidak memiliki Sumur.” (wawancara bapak E)

Dalam pemanfaatan bantuan sumur bor ini tidak semua warga yang mendapat bantuan dapat

menggunakannya dengan baik karena beberapa sumur bor yang jangkauannya jauh dari perumahan warga seperti pada RT 04 dan RT 05 hal ini yang masih menjadi kendala dalam pemanfaatan

“Untuk memanfaatkan bantuan sumur bor yang tidak terpakai harus ada inisiatif dari pemerintah Negeri agar bisa memanfaatkan bantuan yang ada seperti buatlah bak penampung air agar semua warga dapat memanfaatkannya secara bersama sama.” (wawancara Bapak H)

6. Bantuan Dana Bergulir

Perikanan merupakan sektor unggulan negeri Tehoru. Tehoru memiliki luas lahan tangkap kurang lebih 30 mil dan jangkauan kedalaman laut sedalam 30 mil. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Direktorat Pelayanan Sosial Dasar berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui Program P3SD memberikan bantuan berupa Pelatihan Peningkatan Ekonomi Rakyat dan Pemberian Modal Usaha

Bantuan modal usaha untuk memperkuat produk unggulan di negeri Tehoru adalah hasil-hasil perikanan Ikan. Dalam wawancara dengan ketua Badan Usaha Milik Negeri (Bumneg) Tehoru Bapak NL mengatakan bahwa:

“Bantuan yang diberikan kepada 6 (enam) kelompok masing-masing kelompok berjumlah 5 (lima) orang sehingga total keseluruhan penerima bantuan sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Masing-masing kelompok menerima Rp 5.000.000 (lima juta) rupiah.”

Manjemen pengelolaan diatur oleh Bumneg Tobojuete, sesuai dengan keputusan di Negeri, dengan sistem dana bergulir. Diharapkan dengan sistem dana bergulir dapat mengembangkan usaha usaha potensial lainnya di negeri Tehoru.

Dana yang diberikan dalam bentuk dana bergulir, untuk selanjutnya dapat diberikan kepada kelompok lain ataupun penguatan kelompok yang sama. Terdapat beberapa kendala dalam perguliran yaitu: (1) pembayaran kadang terlambat, karena terkadang kelompok usaha mendapatkan pendapatan sedikit sehingga sulit untuk di saving untuk pembayaran bulanan; (2) kelompok tidak memisahkan antara uang masuk dengan uang keluar; (3) Sebagian besar alokasi keuntungan di gunakan untuk konsumtif. Dari hasil kajian di lapang menggambarkan tiga kendala tersebut menjadikan perputaran dana sangat sulit. Namun pada kondisi tersebut Bumneg tidak dapat

memaksakan pengembalian sesuai dengan waktu setiap bulan berjalan dengan lancar, karena tidak semua kelompok dapat memiliki keuntungan yang dapat digunakan untuk pengembalian bulanan. Asalkan kondisi yang dialami oleh kelompok benar-benar demikian, maka Bumreg dapat memahami. Sebagaimana kutipan di bawah ini

Kita sangat memaklumi kondisi di negeri, kalau memang bulan ini sangat sulit, maka kami selalu anjurkan kalau bisa disisipkan setiap minggu atau setiap hari khusus untuk pengembalian sehingga tidak emmbatkan untuk pengembalian setiap bulannya. Masyarakat juga tidak pernah ingkar, palingan tertunda. Kalau tidak membayar pasti menjadi buah bibir, orang tidak akan percaya lagi. (wawancara: anggota Bumreg).

7. Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Masyarakat Negeri Tehoru

Penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Tim P3SD, dipimpin Kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan dilakukan selama dua hari. Kegiatan penyuluhan diawali dengan pemberian brosur yang memuat informasi pencegahan dini penyakit yang memang lebih banyak diderita di masyarakat seperti sakit gula, asam urat, dan kolestrol karena lebih banyak disebabkan pola hidup yang salah. Brosur yang diberikan juga akan dipergunakan sebagai kartu control kesehatan, yang memuat pendeteksian terhadap penyakit yang diderita.

“Program Penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan yang di laksanakan oleh P3SD sangat bermanfaat bagi kami masyarakat yang masih di bilang kurang mendapatkan informasi tentang berbagai penyakit, karena selama banyak masyarakat Negeri Tehoru masih menggunakan Pengobatan Tradisional dengan adanya penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan kita sudah tahu berbagai penyakit dan penanggulungan serta pengobatan dan juga pola hidup Sehat.” (wawancara: Ibu NL)

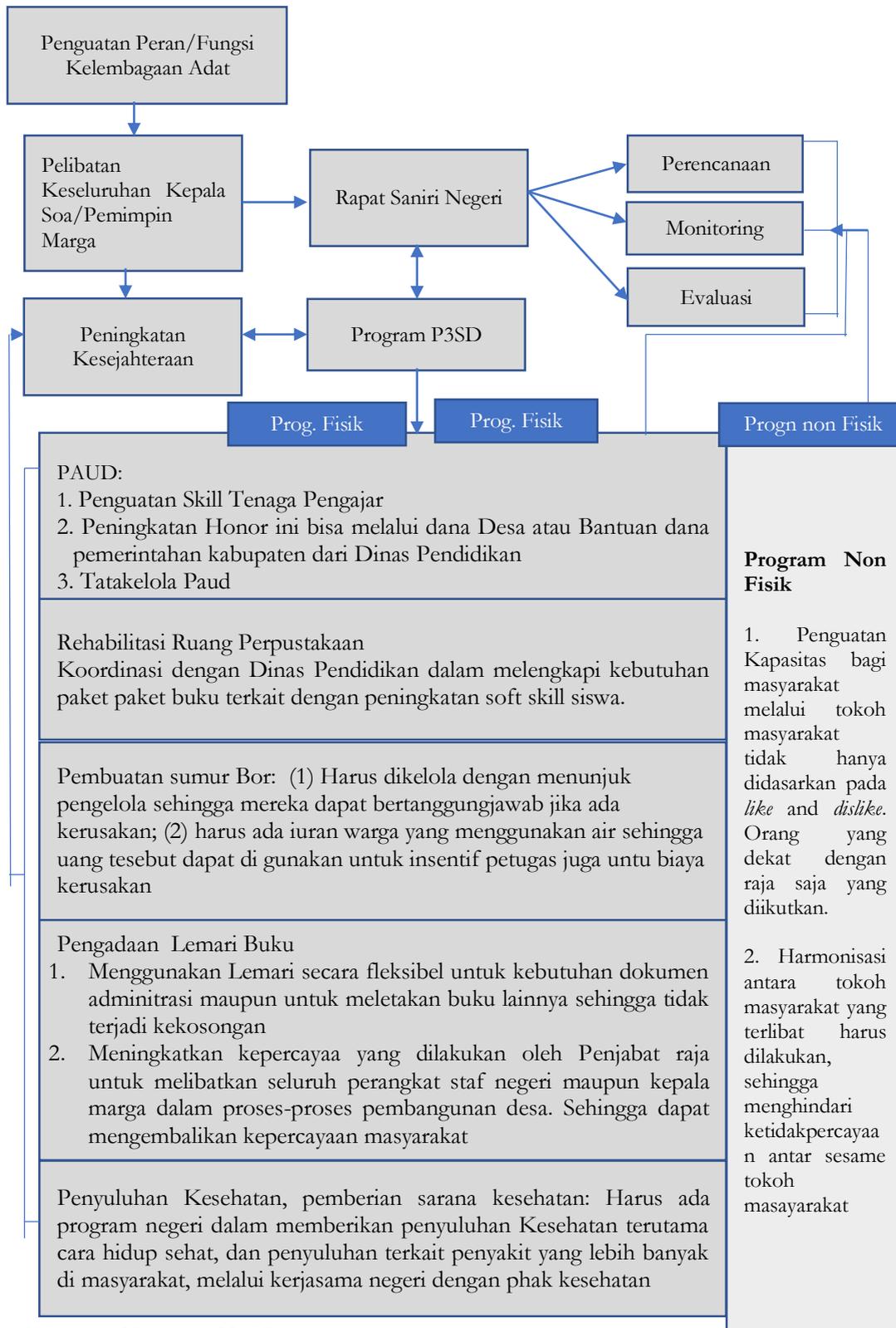
Dari pernyataan di atas tersirat, kegiatan yang telah dilakukan oleh P3SD, sudah sangat diketahui oleh masyarakat, karena program yang dilakukan oleh P3SD selama dua tahun. Dan para petugas Kesehatan serta, tokoh masyarakat yang terlibat dengan program mendapat penguatan capacity building dalam melaksanakan program di lapangan. Sehingga informasi menyebar sempurna di masyarakat yang dilegalkan melalui rapat bersama melalui kelembagaan sanini negeri.

8. Program non Fisik

Program non fisik berupa penguatan kapasitas tokoh masyarakat yang terlibat dengan program P3SD. Dari hasil lapang, keluhan masyarakat terkait masyarakat yang diikutkan lebih banyak adalah yang memiliki kedekatan dengan PLT raja, tidak ada mekanisme rapat bersama untuk menentukan masyarakat yang dapat dilibatkan pada program, baik yang di P3SD maupun program dengan pihak lainnya.

II. Model Penguatan Pemberdayaan Program Pusat Pembelajaran

Pelayanan Sosial Dasar



Sumber: Konstruksi Hasil Penelitian.

Gambar (2) Model Penguatan Program P3SD

Model penguatan program P3SD adalah merupakan model yang dibangun berdasarkan pengalaman masyarakat dalam pengelolaan program P3SD. Dari pelaksanaan yang telah dilakukan beberapa hal yang perlu dilakukan agar menjadi penguatan keberlanjutannya.

Mendasarkan pada gambar diatas perlu adanya penguatan peran kelembagaan adat saniri negeri yang merupakan perwakilan masyarakat. Selama ini kelembagaan saniri negeri hanya dikendalikan oleh PLT raja dengan beberapa kepala soa/pemimpin marga, maka penguatannya ada pada pelibatan semua pemimpin marga, yang harus diputuskan segala kegiatan atau program di tingkat rapat bersama antara masyarakat dengan seluruh pemimpin marga, raja dan staf pemerintah negeri. Rapat saniri negeri harusnya membahas perencanaan program, evaluasi sampai monitoring program yang diputuskan secara bersama di rapat saniri negeri, hal ini sesuai hasil kajian Direktorat Pelayanan Sosial Dasar dalam buku yang berjudul Almanak Desa 2016, bahwa pemerintah Desa dalam melaksanakan perencanaan Pembangunan Desa melibatkan masyarakat Desa dan wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

Rapat saniri negeri akan menentukan program apa yang urgen yang dapat dilakukan oleh P3SD ataupun oleh Lembaga lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program P3SD baik fisik maupun non fisik, harus memastikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk memastikan program berdampak kepada masyarakat harus di evaluasi dengan menggunakan indicator melalui tujuan program yang telah di tetapkan, apakah berhasil ataukah tidak, sehingga Langkah perbaikan dapat dilakukan, melalui rapat bersama di Lembaga saniri negeri.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan program dilakukan dalam dua tahap, yaitu: penyusunan program dan pelaksanaan program. Kedua tahapan tersebut belum maksimal dalam melibatkan stakeholders, yang terlibat adalah orang-orang yang dekat dengan raja
2. Model Pemberdayaan program fisik dan non fisik merupakan pengalaman masyarakat dalam pengelolaan sehingga konstruksi model penguatan program P3SD adalah berasal dari keinginan

masyarakat sehingga model yang dibangun adalah perspektif masyarakat negeri tehoru.

Implikasi

Mengingat program P3SD berperan penting di negeri Tehoru, diharapkan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan pemerintah Negeri Tehoru harus memperhatikan:

1. Insentif bagi guru honor di Paud yang telah dibangun oleh kementerian pedesaan, dengan memperhatikan standar upah minimum regional, agar guru-guru honor dapat bekerja secara lebih bertanggungjawab. Insentif ataupun biaya honor dapat di tingkatkan melalui alokasi dana desa yang harus di rencanakan dalam rapat bersama di tingkat pemerintahan negeri dan dalam rapat besar di saniri negeri.
2. Tata Kelola Paud dan Bumdes harus di Kelola secara baik, dan dapat di evaluasi melalui kelembagaan saniri negeri dalam satu tahun sekali, dan di tingkat saniri negeri dan raja dilakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali.

DAFTAR REFERENSI

- Direktorat Pelayanan Sosial Dasar (2016). *Almanak Desa*. Penerbit Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Ellis , Frank dan Stephen Biggs .(2001). *Evolving Themes in rural Development 1950s-2000s*. Development Policy Review, Vol 19, No 4:437-448
- Prijono, O.S. dan Pranarka, A.M.W., (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Penerbit Centre for Strategic and International Studies, Jakarta
- Sangadji Maryam, Muspida, (2019). *Model Ekonomi Bersama Melalui budaya Sasi Kontrak dan Sasi Negeri di Kepulauan Maluku*. Jurnal Media Trend. Volume 14 No 1 Maret 2019. Penerbit. Lembaga Kajian Transformasi dan Regulasi Ekonomi Daerah Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura UU Desa Nomor 6 tahun 2014.
- Yustika Ahmad Erani, 2016. *Konsep Ekonomi Kelembagaan: Pedesaan, Pertanian, dan Kedaulatan Pangan*. Cetakan ke dua. Penerbit. Empat Dua Malang Jatim.